

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian bahwa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala sekolah bertopik sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan hakim dalam kasus korupsi PPDB online yang dilakukan kepala sekolah SMAN 8 Kota Jambi dengan tuntutan yang lebih rendah dari tuntutan JPU, dengan masa tahanan hanya 1 tahun 9 bulan sedangkan tuntutananya 2 tahun, berdasarkan keputusan hakim menimbang beliau sudah lanjut usia dan beliau tulang punggung keluarga.
2. Hukuman yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan retributif, di mana sanksi seharusnya sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.
3. Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perangkat hukum yang jelas untuk menindak korupsi, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek efektivitas sanksi. Vonis yang lebih ringan dari tuntutan menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera, yang berpotensi mendorong praktik serupa terjadi kembali di masa depan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pembahasan, berikut beberapa saran untuk masa yang akan datang sesuai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala sekolah sebagai seorang PNS dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terutama di Kota Jambi:

1. Pengawasan yang lebih ketat dalam proses PPDB : Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap PPDB online agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan sistem audit berkala dan membuka akses pelaporan bagi masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan.
2. Perlindungan bagi korban dan pelapor : Banyak korban atau wali murid yang enggan melaporkan kasus korupsi dalam PPDB karena takut akan dampak negatif bagi anak mereka. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan bagi pelapor (whistleblower protection) agar masyarakat lebih berani mengungkap praktik korupsi tanpa takut mendapatkan ancaman atau diskriminasi.
3. Wujudkan transparansi dalam sistem PPDB : Pemerintah harus terus memperbaiki sistem PPDB dengan menerapkan kebijakan yang lebih transparan, seperti publikasi hasil seleksi secara terbuka dan penggunaan teknologi yang lebih aman dari manipulasi. Selain itu, pelaksanaan PPDB harus diawasi oleh lembaga independen guna memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai aturan.